VI. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kabupaten Pringsewu relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut dapat terlihat dari angka IPM Kabupaten Pringsewu yang berada pada peringkat ketiga, berbanding terbalik dengan angka Kabupaten Lampung Barat yang memiliki ranking IPM rendah, yaitu peringkat ke-13 dari 15 kabupaten di Provinsi Lampung. Pembangunan Pringsewu juga memiliki peningkatan yang cukup pesat dengan angka reduksi *shortfall* urutan ke-4, sedangkan Kabupaten Lampung Barat memiliki peningkatan pembangunan paling lambat di Provinsi Lampung, yaitu peringkat ke-14 (Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki angka reduksi shorfall).
2. Pembangunan yang relatif buruk di Kabupaten Lampung Barat juga termanifestasi dalam berbagai elemen pembentuk IPM, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Lampung Barat memiliki AHH sebesar 67,81 sedangkan Kabupaten Pringsewu memiliki AHH yang relatif lebih baik yaitu sebesar 68,77. Pada tahun 2013 daya beli masyarakat Kabupaten

Lampung Barat terpaut cukup jauh dengan Kabupaten Pringsewu, yaitu 611,41 sedangkan Kabupaten Pringsewu memiliki angka daya beli masyarakat sebesar 634,31. Kabupaten Lampung Barat relatif unggul dalam AMH yaitu 96,76 sedangkan Kabupaten Pringsewu terpaut sangat tipis yaitu 96,54. Namun Kabupaten Pringsewu memiliki RLS yang lebih baik yaitu 8,64 tahun sedangkan Kabupaten Lampung Barat hanya 7,47 tahun. Secara umum, Kabupaten Pringsewu relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Lampung Barat.

3. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu memiliki kebebasan politik yang relatif cukup baik. Setiap orang bisa menyampaikan ide dan gagasan secara bebas tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Namun, secara umum kebebasan politik di Kabupaten Pringsewu lebih baik dibandingkan dengan kebebasan politik di Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut terlihat dari tingkat kritis masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Pringsewu sebagai basis perguruan tinggi dan memiliki masyarakat sipil yang sangat kritis. Sedangkan Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki perguruan tinggi dan masyarakat sipil yang berani berseberangan dengan pemerintah daerah relatif tidak ada.
4. Kabupaten Pringsewu memiliki jaminan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut terlihat dari perkembangan perekonomian di Kabupaten Pringsewu sangat signifikan, sedangkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat relatif sangat lambat. Hal tersebut disebabkan oleh peluang usaha yang sangat

terbuka di Kabupaten Pringsewu, sedangkan peluang usaha di Kabupaten Lampung Barat cenderung sangat lemah karena perputaran ekonomi yang relatif rendah.

5. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu memiliki jaminan sosial dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang cukup baik. Sebagian besar masyarakat di kedua kabupaten menyatakan cukup puas dengan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, secara umum, Kabupaten Pringsewu memiliki jaminan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut terlihat dari rasio guru dan murid di Kabupaten Pringsewu yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat. Kemudian jaminan kesehatan balita di Kabupaten Pringsewu sudah juga sudah memenuhi standar nasional, sedangkan jaminan kesehatan balita di Kabupaten Lampung Barat relatif masih jauh tertinggal.
6. Kondisi keamanan di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu juga sangat baik. Meskipun, kedua daerah memiliki catatan konflik yang cukup banyak, namun pemerintah daerah kedua kabupaten mampu menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak menjadi konflik terbuka yang memakan korban. Selain itu, peran aparat untuk menciptakan keamanan cukup dominan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah konflik terjadi di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu, yaitu, penciptaan lapangan kerja, peningkatan tingkat pendidikan, menggiatkan kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan

peran fungsi kontrol sosial, berupa ketegasan penanganan konflik oleh aparat keamanan, termasuk kegiatan cegah dini oleh aparat inteljen.

7. Kabupaten Pringsewu memiliki tata kelola pemerintahan yang relatif lebih terbuka dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat. Fakta tersebut terlihat dari hasil uji akses, di mana Kabupaten Pringsewu mendapatkan nilai indeks 1,36 yang berarti cenderung tertutup sedangkan Kabupaten Lampung Barat mendapatkan nilai indeks 0,63 yang berarti sangat tertutup. Namun secara umum memang transparansi tata kelola pemerintahan kedua kabupaten relatif tertutup. Masyarakat sangat sulit untuk mengakses informasi publik, kemudian pemerintah sebagai pelayan publik juga tidak menerapkan transparansi pemerintahan secara maksimal.
8. Lambatnya pembangunan di Kabupaten Lampung Barat disebabkan oleh adanya institusi ekonomi politik ekstraktif yang memonopoli kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menyejahterakan diri serta kelompok. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pemilu serta praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mengindikasikan praktek institusi ekstraktif.
9. Pembangunan yang cenderung lebih baik di Kabupaten Pringsewu disebabkan oleh adanya institusi ekonomi inklusif yang mendapatkan kesempatan dari institusi politik ekstraktif. Iklim usaha yang sangat inklusif serta letak wilayah yang sangat strategis membuat pembangunan di Kabupaten Pringsewu sangat pesat.

B. Saran

Secara umum pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

1. Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu sebaiknya mampu mengembangkan potensi daerah. Kabupaten Lampung Barat sebaiknya fokus pada pengembangan sektor pertanian sayuran, perkebunan kopi dan gula aren yang memang menjadi komoditi terkenal di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah daerah dapat membuat pasar induk untuk sayuran untuk menjaga kestabilan harga sayuran. Selain itu, perlu ada industri pengelolaan kopi sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomis kopi Lampung Barat. Selanjutnya, sebaiknya dibuat program-program penyuluhan serta pelatihan pengelolaan kopi agar kualitas kopi Lampung Barat dapat bersaing dengan kopi dari daerah lain. Kemudian Kabupaten Pringsewu sebaiknya mampu mengembangkan pembangunan di sektor jasa tanpa menyampingkan sektor pertanian, dengan cara tetap berpegang teguh pada zonafikasi daerah yang telah dibuat sehingga tidak terjadi peralihan lahan sawah menjadi lahan bangunan untuk sektor jasa.
2. Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu sebaiknya melibatkan masyarakat, baik itu dimulai dari proses formulasi program pembangunan, implementasi serta evaluasi. Sehingga pembangunan yang diwujudkan oleh pemerintah cukup efektif serta sesuai

dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat forum diskusi dan dialog secara rutin bersama dengan masyarakat, sehingga terciptalah sebuah sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Kabupaten Lampung Barat dan Pringsewu perlu lebih meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan medis. Selain itu, sebaiknya ada juga peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Kemudian, yang paling penting adalah pesebaran sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata di semua kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang berada di kawasan pinggiran, seperti Kecamatan Lombok Seminung di Kabupaten Lampung Barat dan Kecamatan Pagelaran Utara di Kabupaten Pringsewu.
4. Keamanan di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu sudah sangat baik. Untuk memertahankan itu keadaan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu dapat melakukan beberapa upaya, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan tingkat pendidikan, menggiatkan kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan peran fungsi kontrol sosial, berupa ketegasan penanganan kriminalitas oleh aparat keamanan, termasuk kegiatan cegah dini oleh aparat inteljen.
5. Perlu adanya perbaikan institusi politik di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat seyogyanya menjunjung tinggi asas transparansi, melibatkan partisipasi masyarakat serta menghilangkan diskriminasi politik di dalam pergolakan politik elit. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan memberikan

publikasi melalui media terkait kinerja pemerintah baik yang menyangkut anggaran dan realisasi program pembangunan. Kabupaten Pringsewu sebaiknya memiliki institusi politik yang menganut pluralitas dan inklusivitas seperti yang terjadi pada institusi ekonomi. Keadaan tersebut bisa terciptakan melalui memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan, melalui forum-forum musyawarah di tingkat desa.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebaiknya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjanjikan berbagai insentif ekonomi. Selain itu juga, pemerintah daerah sebaiknya bersikap terbuka kepada berbagai pelaku ekonomi agar para investor tertarik untuk investasi, sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Lampung Barat semakin gencar seperti di Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan bersifat transparan dalam hal perizinan dan memberikan proses perizinan yang efektif dan efisien terutama terkait perizinan di lingkungan masyarakat. Sedangkan institusi ekonomi Kabupaten Pringsewu sebaiknya mampu mengembangkan ekonomi, namun tetap harus berpedoman pada potensi lokal seperti pemanfaatan tanaman bambu sebagai *landmark* dari Kabupaten Pringsewu.
7. Perlu ada kekuatan penyeimbang pemerintah agar tidak ada penyelewengan dan monopoli kekuasaan, dalam hal ini adalah para pegiat sosial yang tergabung dalam berbagai LSM, sehingga dapat menekan perkembangan institusi ekonomi politik ekstraktif di dalam tubuh pemerintah daerah. Para pegiat LSM dapat melakukan pengawasan dengan memberikan kritik

terhadap pemerintah melalui media terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan terkait kebutuhan dasar masyarakat.